

Evaluasi Perjalanan Program TPID dan Ekspektasi Program Kerja 2018 di Jawa dan Kalimantan

Prof. Dr. Bustanul Arifin

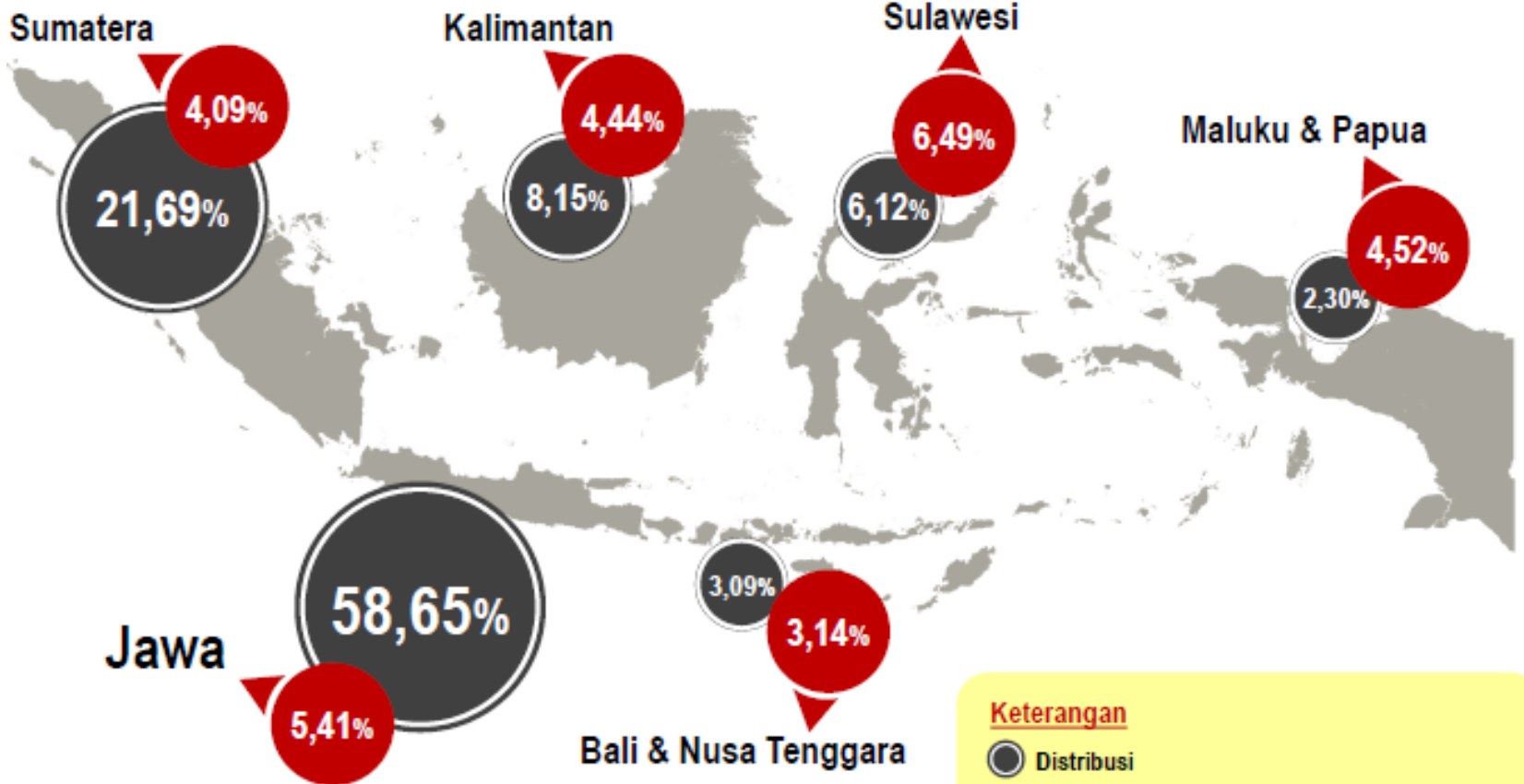
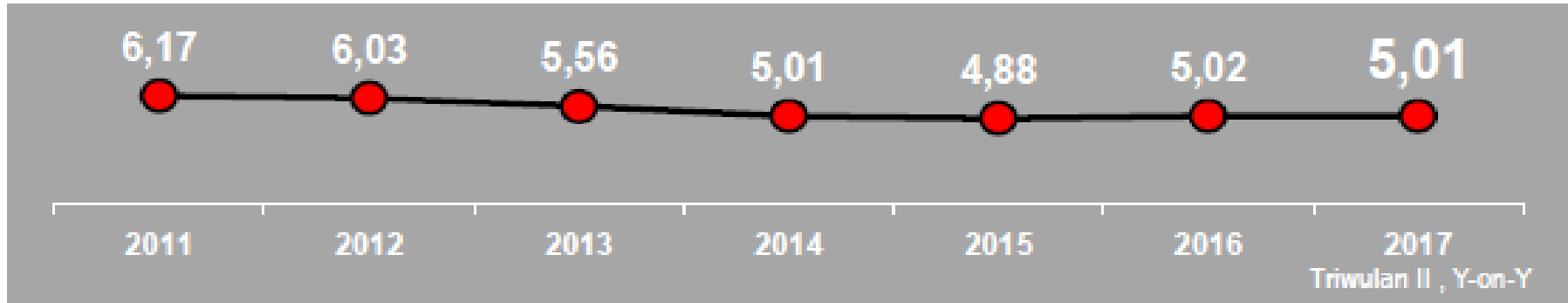
barifin@uwalumni.com

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA
Dewan Komisiner dan Ekonom Senior INDEF
Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan

Outline Penyajian

1. Laju Inflasi terkendali, tapi inflasi pangan bervariasi
2. Program konkrit TPID di Sumatera dan Bali-Nusra
3. Arah Presiden pada Rakornas TPID 2017
 - APBD penguatan infrastruktur & pengendalian harga pangan
 - Penguatan pertanian melalui sistem agribisnis
 - Perbaikan tata niaga dan distribusi pangan di daerah
 - Pengawasan distribusi-perdagangan pangan di daerah
4. Catatan Penutup: Rekomendasi Kebijakan

Kinerja Pertumbuhan dan Distribusi Ekonomi



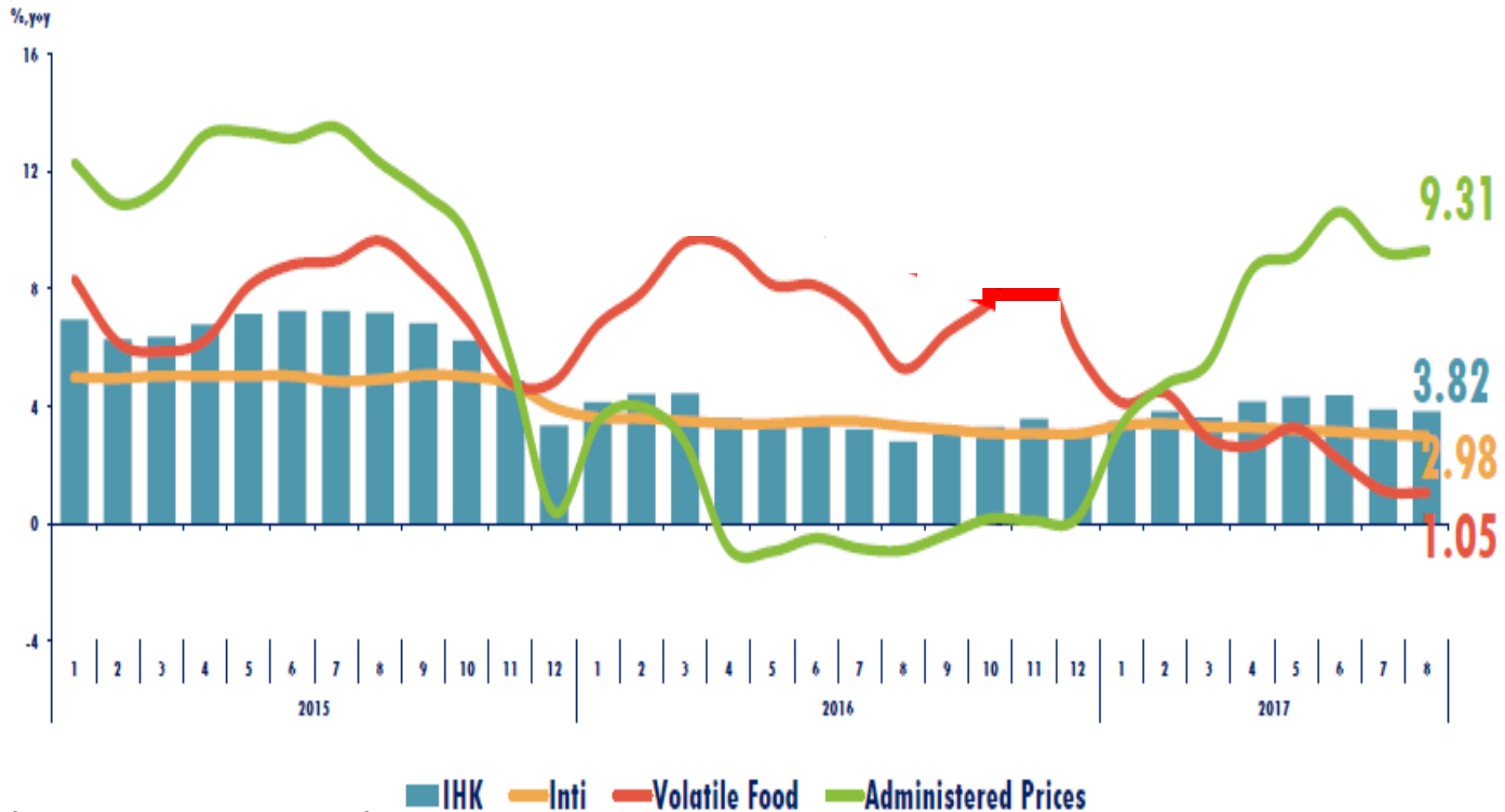
Keterangan

- Distribusi
- Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2017 (Y-on-Y)

Sumber: BPS, 2017

Laju Inflasi Terkendali. Harga Pangan Stabil

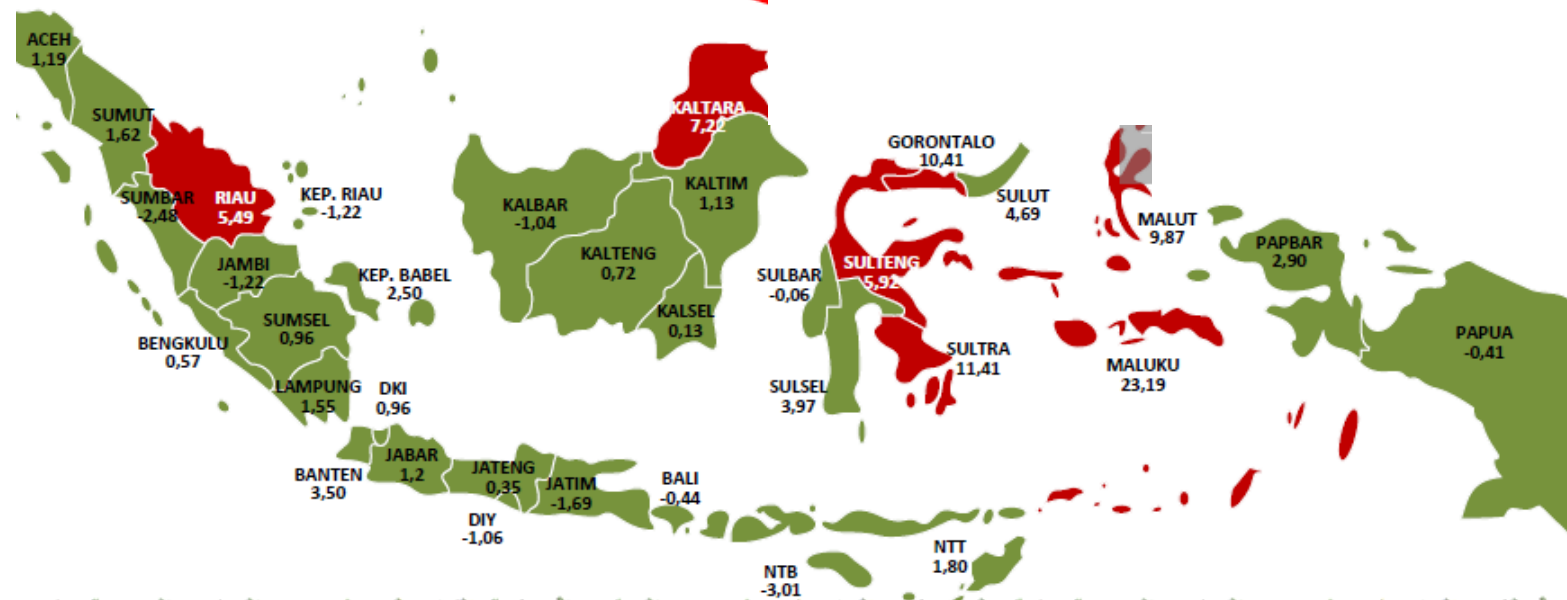
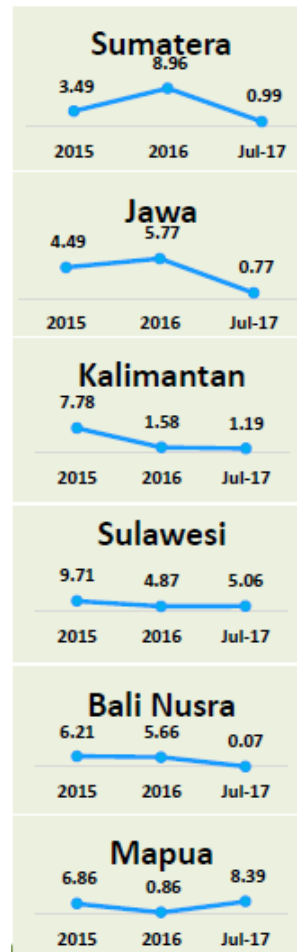
Inflasi administrasi harga (Program Pemerintah) tidak terkendali: Tarif listrik, harga gas, dll



Sumber: Dikompilasi BI, dari data BPS

Inflasi Pangan di beberapa daerah juga terkendali

- Laju inflasi karena volatilitas harga pangan masih tinggi, karena bukan sentra produksi pangan strategis (pemicu inflasi), seperti di Provinsi Maluku (23.18%), Sulawesi Tenggara (11,41%), Gorontalo (10.41%), Maluku Utara (9,8%) dan lain-lain
- Koordinasi kewilayahan prioritas 2018. Laju inflasi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara cukup konsisten. Tapi Sulawesi dan Maluku-Papua perlu perhatian khusus dan ekstra.



Program Konkrit TPID Provinsi Banten dan DKI Jakarta

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
Banten	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan bibit padi unggul BATAN • pembelian bibit bawang merah yg terjangkau dari Balitsan • <i>pilot project</i>: pengaturan pola tanam cabai mingguan & penanaman di pekarangan rumah (Gardu Pangan) 	Total: 4.98% VF: 6.4%	<ul style="list-style-type: none"> • Peran kepemimpinan daerah yang baik • Keselarasan program antar instansi terkait • Peningkatan produksi & produksi horti yang terencana dan terukur • termasuk dalam "upaya khusus" budidaya hortikultura dan beras 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensus komoditas pangan pemetaannya (akurasi data) • Pengawasan produksi & distribusi di sentra produksi pangan • Revitalisasi jembatan timbang, dikoordinasi secara nasional • Perbaikan wewenang & anggaran Bulog
DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Penjajakan pembelian mesin CAS (<i>Controlled Atmosphere Storage</i>) utk penyimpanan hortikultura • Penjajakan penanaman cabai di Ciangir • Perluasan kerjasama pangan antardaerah 	Total: 5.35% VF: 4.5%	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan tinggi pada kerjasama pembelian mesin CAS • Kerjasama pangan antardaerah • Demplot penanaman cabai di Ciangir I 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar tidak terdapat kenaikan harga BBM bersubsidi • Menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah

Program Konkrit TPID Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
Jabar	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman cabai di balai (Ngipuk) • Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) • Kampung Peduli Inflasi • Optimalisasi e-Priangan (Harga dan <i>e-commerce</i>) • Optimalisasi Sistem Resi Gudang 	Total: 5.33% VF: 5.42%	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspektasi tentang kerja sama penempatan transmigran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Administrasi Kependudukan • HLM TPID untuk koordinasi langkah pengendalian inflasi ke depan
Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan teknologi penyimpanan hasil komoditas dengan menggunakan ozone utk memperpanjang usia simpan • efisiensi rantai perdagangan komoditas pangan 	Total: 4.4% VF: 3.8%	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi ozone untuk daya tawar petani. Pada saat harga rendah petani tidak akan merugi dan pada saat jumlah pasokan sedikit petani dapat menggunakan hasil panen simpanannya 	<ul style="list-style-type: none"> • informasi kebijakan kenaikan harga BBM/tarif listrik/ Elpiji/bea-cukai

Program Konkrit TPID Provinsi **DI Yogyakarta** dan **Jawa Timur**

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Poin of Success	Bentuk Koordinasi
DI Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman cabai di pekarangan rumah • Kerjasama antar daerah dengan wilayah penghasil komoditas, khusus cabai • “Sekolah Pasar” sebagai edukasi kepada pedagang mengenai inflasi 	Total: 4% VF: 5.2%	Kerjasama antar daerah untuk memotong rantai <i>middle man</i> , sehingga harga i lebih wajar dan tidak merugikan produsen dan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya nyata efisiensi jalur distribusi • kebijakan pengendalian inflasi pangan nation-wide menghindari risiko spekulasi pedagang • Acuan harga pangan nasional disesuaikan dengan kondisi spasial
Jatim	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Operasi Pasar (Bantuan Ongkos Angkut, Gebyar Pasar Murah, Kios Pangan & resi gudang • Optimalisasi Rumah Pangan Kita, Toko Tani Indonesia, KRPL • UPSUS Sapi Indukan Bunting, Program 1 Kelompok 1 Pangkalan 	Total: 4.79% VF: 3.42%	Disparitas harga pangan antar daerah tidak tinggi, terdapat mekanisme <i>buffer</i> komoditas tak tahan lama, rantai niaga distribusi pangan pendek, mitigasi perubahan cuaca	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi agar peningkatan tarif AP dilakukan ketika inflasi VF sedang rendah • Ada alternatif komoditas pengganti untuk tarif yang dinaikkan • Optimalisasi peran KPD, kerjasama antar instansi

Program Konkrit TPID Provinsi **Kalbar** dan **Kalteng**

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
Kalbar	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan ketersediaan bahan pangan• Operasi pasar• Metode “Hazton” untuk meningkatkan produksi padi		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produksi, kelancaran dist, jaga ekspektasi masy, OP, optimalisi toko tani & Rumah Pangan Kita	<ul style="list-style-type: none">• Timing reformasi kebutuhan energi
Kalteng	<ul style="list-style-type: none">• Kandang dan Kolam Penyangga• Pasar Penyeimbang• Roadmap cabai dan bawang merah• Instruksi Gubernur mengenai penanaman cabai bagi ASN	Total: 4.28% VF: 5.72%	<ul style="list-style-type: none">• Sinergi dengan Dinas Pertanian,• Pembenahan Infrastruktur konektivitas	<ul style="list-style-type: none">• Inisiasi untuk kerjasama antardaerah

Program Konkrit TPID Provinsi Kaltimra dan Kalsel

Provinsi	Program Terobosan	Ekspektasi Penurunan Inflasi	Point of Success	Bentuk Koordinasi
Kaltimra	<ul style="list-style-type: none">• Rumah Pangan Lestari• Sekolah Peduli Inflasi	Total: 3.92% VF: 2.62%	<ul style="list-style-type: none">• Konsistensi TPID tentang program yang telah disusun• Inovasi Program pengendalian inflasi• Komitmen pimpinan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi peran TPID Provinsi sebagai Koordinator TPID di wilayah Kaltimra
Kalsel	<ul style="list-style-type: none">• Pendirian pabrik pengolahan ikan gabus• Pembuatan warung TPID• Penyebarluasan rumah pangan kita dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Total: 4.70% VF: 2.50%	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian inflasi yang bersumber dari kenaikan harga ikan gabus pasca pembentukan pabrik Ikan gabus, sangat baik.	<ul style="list-style-type: none">• Peninjauan Pusat Distribusi Regional di Kalsel• Percepatan Pembangunan Bandara Syamsudin Noor

Arahan Presiden pada Rakornas TPID 2017

1. Optimalkan APBD untuk penguatan infrastruktur dan pengendalian harga pangan
2. Penguatan pertanian melalui sistem agribisnis
3. Perbaiki tata niaga dan distribusi pangan di daerah
4. Pengawasan distribusi-perdagangan pangan di daerah

1. Belanja APBD: Infrastruktur & Pengendalian Harga

- Permendagri 33/2017: Pemerintah Daerah men-sinergikan penganggaran program dan kegiatan penyusunan APBD 2018 dengan nasional, seperti pengendalian inflasi daerah.
- Arahan Presiden: Belanja produktif mendorong ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan
- Fokus belanja APBD misalnya untuk kegiatan berikut:
 - Infrastruktur pertanian
 - Infrastruktur logistik dan distribusi komoditas
 - Insentif bagi petani, sertifikasi lahan pertanian
 - Pasar murah dan operasi pasar saat terjadi gejolak harga pangan
 - Kerja sama perdagangan dengan daerah lain
- Sistem informasi pangan, sejenis PIHPS, untuk mendukung kredibilitas dan koordinasi respon kebijakan yang akurat.

2. Penguatan Pertanian melalui Sistem Agribisnis

- Sistem agribisnis: suatu rangkaian kesatuan sub-sistem faktor produksi di hulu, produksi dan perdagangan di tengah, panen-pascapanen di hilir dan sub-sistem pendukung lain;
- Faktor produksi: lahan, pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja, pendidikan dan keterampilan petani, dll;
- Produksi: budidaya, praktik pertanian baik (GAP), pola tanam dan pergiliran tanaman, pertanian presisi, dukungan IT dll;
- Distribusi dan Perdagangan: logistik, transportasi, pelaku, penentuan harga, struktur pasar, margin tataniaga dll;
- Panen-Pascapanen: teknologi, hilang-susut, pengolahan, nilai tambah, standarisasi, sertifikasi, keterlacakan dll,
- Pendukung: kebijakan makro, stabilisasi moneter, perbankan, penyuluhan, promosi, investasi, model bisnis, dll

Model Bisnis: Perbaikan Korporatisasi Pertanian

- Orientasi produksi saja tidak cukup, tapi perlu lebih beroperasi perbaikan kesejahteraan petani, manajemen usahatani, pola tanam berkelanjutan, panen-pascapanen;
- Model bisnis melibatkan integrator yang menyatukan pengelolaan lahan pertanian yang terfragmentasi ke dalam suatu manajemen usaha skala agribisnis modern;
- Peran integrator atau petani entrepreneur menyatukan talenta dan potensi: petani, pekerja, agronomis, peneliti, pendamping, penyuluh, industriawan, perusahaan jasa alat pertanian dan logistik, pemilik dana, dan peritel;
- Integrator memfasilitasi adopsi teknologi di lapangan, menyediakan input dan modal kerja bagi petani;
- Singkatnya, model ini mensyaratkan integrator yang menyediakan solusi, *create values*, dan mengambil risiko.

Sekuensi: Pendampingan Petani, Penguatan Kelembagaan Petani, Kewirausahaan Petani

Pendampingan dilakukan dgn sinergi & koordinasi K/L: Penyuluh Pertanian (Kemtan), Pemda, BI & Swasta

Kelompok Petani

- Dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya)
- Non-formal/tidak berbadan hukum

- Sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi

Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan)

- Unit-unit usaha otonom, a.l. unit penyedia SAPRODI, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, dan unit simpan pinjam
- Non-formal/tidak berbadan hukum

- Merespon peluang pasar dan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

- Bergerak dari kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir. Unit produksi berkembang mjd Klmpk Usaha Bersama
- Berbadan hukum/tdk berbadan hukum

- Meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha

Badan Usaha Milik Petani (BUMP)

- Berbadan hukum, dapat berupa: Koperasi atau Perseroan Terbatas
- BUMP tidak terbatas usahatani tanaman pangan, tetapi juga BUMP Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pengrajin, dan juga UMKM

- Mensinergikan kegiatan bisnis & pemberdayaan petani secara korporasi
- Berorientasi keuntungan & mendorong kemandirian petani
- Meningkatkan posisi tawar petani saat mengadakan kemitraan

Dasar Pembentukan

Fungsi

3. Tataniaga dan Distribusi Pangan di Daerah

- Langkah pertama, identifikasi karakter sistem tataniaga dan distribusi pangan strategis di daerah, setiap daerah memiliki sistem tataniaga dan pola pergerakan harga yang khas dan unik;
- Perhatikan kinerja produksi, pemasukan pangan dari daerah lain, dan keseimbangan *supply & demand* produk pangan tersebut;
- Lakukan analisis struktur pasar, struktur industrinya, kenali pelaku tataniaga dan keseluruhan sistem rantai nilai yang terbentuk
- Perdalam sistem informasi harga, pembentukan harga, karakter modal sosial dan pola hubungan antarpelaku tataniaga berikut resiliensi sistem tataniaga terhadap gangguan faktor eksternal;
- Perbaikan tataniaga dan distribusi pangan di daerah tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan saja. Solusi perbaikan tataniaga perlu spesifik komoditas, spesifik lokasi, jelas dan rinci.

4. Pengawasan Distribusi-Perdagangan di Daerah

- Pemerintah Daerah melakukan registrasi ulang pedagang komoditas pangan strategis, Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- Ujian lapang pertama dari pengawasan distribusi dan perdagangan pangan ini adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras, seperti diatur dalam Permendag No: 57/M-DAG/PER/8/1997
- Referensi Filipina (Price Control Republic Act No. 7581):
 - bagi pihak yang melakukan manipulasi harga: kurungan 5-15 tahun dan denda PHP 5.000-PHP2.000.000.
 - bagi pihak yang melanggar price ceiling: kurungan 1-10 tahun dan denda PHP5.000-PHP1.000.000.
- Referensi Malaysia (Price Control and Anti Profitering Act 723/2011)
 - Berlaku harga/margin maksimal pada waktu tertentu (HKBN)
 - Perubahan *cost structure* berpotensi mengubah harga jual, wajib dilapor
 - Intervensi dilakukan setiap saat degan mendirikan Kedai Satu Malaysia

Potensi Dampak Negatif Pengawasan Eksesif

- Aturan main, kepastian kebijakan dan keteraturan implementasi kebijakan merupakan kondisi ideal dalam stabilitasi harga dan pengendalian inflasi;
- Pengawasan perjalanan kebijakan diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan ekonomi;
- Akan tetapi, pengawasan ekksesif dari penegak hukum dapat mengarah pada iklim usaha tidak kondusif;
- Kepastian usaha yang rendah justru dapat mengurangi aktivitas investasi dan bisnis secara umum, yang amat berpengaruh pada kinerja perekonomian nasional;

Perkiraan Dampak HET Beras (Sawit, 2017)

- Penyerapan gabah lesu pada musim panen raya. Penggilingan padi produsen beras akan mengurangi daya serap gabah. Perbedaan harga beras antarmusim dan antartempat **tidak menarik lagi** bagi mereka.
- Sanggupkah Bulog mengambil alih sebagian peran swasta untuk menyerap tambahan gabah tersebut? Jika Bulog tidak mampu, maka harga GKP akan jatuh. Jika Bulog mampu menyerap, siapa yang harus menanggung potensi kerugian karena penurunan kualitas dan susut?
- Jika harga GKP ditekan sampai Rp 3.700/kg, penggilingan padi atau produsen beras dan pedagang beras medium dan asalan masih dapat beroperasi karena ada insentif HET Rp 9.450/kg. Tapi, petani akan protes (terutama di wilayah defisit padi), karena biaya produksi gabah lebih tinggi karena produktivitas rendah.
- Jika harga GKP tidak dapat ditekan dan tetap tinggi Rp 4.700/kg atau lebih, maka petani tentu merasa terbantu, tapi penggilingan padi atau produsen beras dan pelaku usaha akan merugi. Ancaman serius bagi industri perberasan, selain karena inefisiensi secara struktural.

Catatan Penutup: Rekomendasi Kebijakan

- Penguatan TPID amat dibutuhkan untuk stabilitas harga dan pengendalian inflasi, terutama karena pangan volatil;
- TPID perlu bersinergi dengan satgas pangan, sinergi pembinaan dan penegakan hukum, kunci penting bagi stabilitas harga dan iklim usaha yang kondusif di daerah;
- Perbaiki sistem insentif berbasis inovasi teknologi, bukan subsidi, untuk peningkatan efisiensi produksi. Kemitraan ABGC (academics, business, government and civil society)
- Korporisasi pertanian memerlukan bisnis agregator yang tangguh dengan suatu tahapan pengembangan tingkat kebijakan yang sistematis, tidak berkembang secara sporadis;
- Studi mendalam masih dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen: Antisipasi sofistikasi rantai nilai pangan di tingkat global, sertifikasi & keterlacakan asal, dsb;